

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Butuh Infrastruktur yang Efektif

### Desak kelanjutan Proyek Normalisasi

#### Desak Kelanjutan Proyek Normalisasi

JAKARTA – Pacsabanjir yang melanda DKI Jakarta, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, Pemprov harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta.

Menurut dia, Pemprov DKI harus membangun suatu infrastruktur yang efektif dan efisien yang dapat menanggulangi banjir di Jakarta.

“Fraksi PDIP merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus ke masalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat,” ujar dia, Minggu (5/1/2020).

Fraksi PDIP sepenuhnya menyadari bahwa hal itu terjadi karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. Belum ada pemetaan masalah dan solusi yang baik terkait banjir di Jakarta.

Bahkan Fraksi PDIP, kata Gembong, menilai bahwa program Vertical Drainage ternyata tidak menjadi solusi dalam mengatasi banjir. Diperlukan adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti yang terapkan pada 2016 yang dinilai efektif. “Sejumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam kurun waktu selama satu tahun,” tutur Gembong.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak kelanjutan proyek normalisasi kali. Sehingga bisa mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota setiap musim hujan tiba.

“Jakarta yang hari ini mendapat satu bencana banjir yang kebetulan di semua wilayah kota. Nah di sini pemerintah daerah harus benar-benar ada artinya. Normalisasi kali ini harus dilaksanakan ditindak lanjut, tidak bisa tertunda-tunda lagi,” tegas pria yang akrab disapa Pras itu, Sabtu (4/1/2020).

Selain itu, sambung Pras, sistem buka tutup air harus dilakukan dengan baik. Bila diabaikan, maka kesiapan menghadapi ancaman banjir jadi tidak ada.

“Kalau kayak seperti sekarang ini, mungkin di Pintu Sunter semua dibuka gitu. Nah, saya tadi melihat di Gunung Sahari ada satu pompa yang kebetulan buat nyedot air keluar. Itu artinya enggak siap. Padahal itu produk tahun 2019 bulan 11 (November 2019),” ujar dia.

“Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya dipersiapkan menjelang hujan. Jangan sampai pekerjaan seperti ini gedebak-gedebuk (tergesa-gesa karena panik),” tutur Prasetyo.

Karena sudah terjadi banjir besar, Pras mendesak kepada Pemprov DKI untuk ke depannya konsen untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ia meminta, fokus anggaran pada tahun anggaran 2020 mestinya untuk menyelesaikan permasalahan banjir.

Salah satunya, dengan melakukan normalisasi. “Atau apa yang disebut pak Gubernur naturalisasi. Saya enggak ngerti itu harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Jadi tidak bisa ditunda karena masalahnya dari pak gubernur sebelumnya sampai Pak Anies Baswedan, Pak Sutiyoso, Pak Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok Pak Djarot, masalahnya sama,” tutur Prasetyo.

Pras mengungkapkan, dirinya tidak memahami konsep naturalisasi yang digagas Anies. Menurut dia, konsep naturalisasi yang disebut seperti Singapura, belum tentu cocok diterapkan di Jakarta. “Kalau Singapura naturalisasi itu emang beda konteks dengan tanahnya atau apanya. Kalau di sini kan ya harus normalisasi. Harus ada kali besar dan jalan kiri kanan,” ungkap dia.

Pemprov DKI, tambah dia, memiliki anggaran untuk menyelesaikan masalah banjir dan macet di Jakarta. Dia kemudian menyoroiti anggaran penyelesaian banjir yang diefisiensi oleh Pemprov DKI.

“Saya juga melihat penambahan kemarin biaya banjir diefisiensi. Sebetulnya juga enggak betul ini. Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif, konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang. Kami melihat di Kelurahan Gunung Sahari Utara masih terendam,” pungkas Pras. (bar)